

BAB II

GAMBARAN POLITIK LUAR NEGERI TURKI

Untuk menjelaskan politik luar negeri Turki, pada bab ini akan dimulai dengan menjabarkan profil Negara Turki termasuk latar belakang sejarahnya. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan politik luar negeri Turki pada era AK Party serta hubungan bilateral Turki-Iraq dan kebijakan pemerintah Turki terkait pemerintahan KRG.

A. Latar Belakang Sejarah Turki

Republik Turki adalah sebuah negara yang 97% wilayahnya terletak di Semenanjung Anatolia (Asia Barat Daya) dan 3% lainnya ada di Semenanjung Balkan (Eropa Tenggara). Negara trans benua ini memiliki luas sebesar 783,562 km² yang berbatasan langsung dengan 8 negara dan 3 laut, yaitu : Armenia, Azerbaijan dan Iran (Timur); Georgia (Timur Laut); Iraq dan Syria (Tenggara); Laut Mediterania (Selatan); Laut Hitam (Utara); Yunani dan Laut Aegea (Barat); serta Bulgaria (Barat Laut). Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh CIA (*Central Intelligence Agency*), jumlah penduduk Turki per Juli 2017 adalah 80,845,215 jiwa. Sebanyak 20% dari total penduduk Turki tersebut berada di Kota Istanbul, hal ini menjadikan Istanbul sebagai kota terpadat di Turki. (Central Intelligence Agency, 2018)

Sebanyak 99,8% penduduk Turki adalah muslim dan mayoritasnya mengikuti paham sunni. Selain Islam, Turki juga menjadi tempat tinggal bagi agama-agama lain terutama Kristen dan Yahudi meskipun hanya berjumlah sedikit, yaitu sebanyak 0,02% dari populasi penduduk. Meskipun etnis Turki merupakan etnis mayoritas dengan prosentase sebanyak 70-75%, tetapi di Turki juga terdapat beberapa etnis minoritas contohnya adalah Kurdi dengan prosentase 19% dan etnis-etnis lainnya seperti Armenian, Bosniak, Arab, dan Albanian. (Central Intelligence Agency, 2018)

Turki merupakan negara republik yang menganut sistem parlementer. Negara ini memiliki 81 provinsi dan beribukota

di Ankara. Saat ini Turki dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan, sedangkan pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri Binali Yildirim, keduanya berasal dari Partai AKP (*Adelet ve Kalkinma Partisi*). Lembaga legislatif Turki menganut sistem unikameral dan dikenal dengan nama *Turkiye Buyuk Millet Meclisi*. Lembaga ini terdiri dari 550 kursi yang akan ditingkatkan menjadi 600 kursi sesuai dengan hasil referendum April 2017 lalu. (Central Intelligence Agency, 2018)

Menulis mengenai Republik Turki tidak dapat terlepas dari latar belakang sejarahnya yang panjang. Sebelum berubah menjadi negara modern, Turki adalah salah satu bagian dari wilayah Kekaisaran Ottoman yang berdiri sejak tahun 1299 hingga 1923. Turki modern memiliki perbedaan signifikan dengan kebanyakan negara yang muncul di abad 19, selain karena Turki adalah negara yang tidak mengalami penjajahan juga karena Turki mewarisi sistem institusi pemerintahan dan administrasi yang bagus dari Kekaisaran Ottoman sehingga hal ini membuat Turki lebih stabil dibandingkan negara-negara lain yang baru berdiri. (Harris, 1980)

Saat masih menjadi salah satu kekuatan yang unggul di dunia, Kekaisaran Ottoman seringkali melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Hal ini menyebabkan Ottoman memiliki wilayah teritorial yang sangat luas meliputi beberapa negara di Eropa Tengah, Eropa Timur dan Timur Tengah. Akan tetapi, mendekati kejatuhannya terdapat berbagai macam persoalan eksternal dan internal yang harus dihadapi oleh pemimpin-pemimpin Ottoman. Memasuki abad ke-17 hingga akhir abad ke-18 negara-negara di Eropa mulai dapat menyaingi kekuatan Ottoman baik dari bidang teknologi maupun ekonomi. Selain itu, militer Kekaisaran Ottoman juga mengalami penurunan dikarenakan kurangnya kedisiplinan dan praktik korupsi yang terjadi di dalam tubuh *Jannisari* (pasukan infanteri Ottoman). (Harris, 1980)

Untuk menghadapi masa-masa sulit tersebut, pemimpin-pemimpin Ottoman memutuskan melakukan reformasi. Urgensi untuk melakukan reformasi di dalam Kekaisaran

Ottoman dimulai sejak abad 17 ketika kekaisaran mengalami penurunan kekuatan. Upaya reformasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kembali otoritas pemerintah pusat. (Toprak, 1999)

Reformasi pertama dimulai pada zaman pemerintahan Sultan Selim III tahun 1789 yang dikenal sebagai *Nizam-i Cedid* (Orde Baru). Pembaharuan yang dilakukan Sultan Selim III pertama kali ditujukan untuk mereformasi militer Ottoman. Seperti yang sudah disebutkan di atas, pembaharuan yang dilakukan Sultan Selim III juga memperkuat otoritas sultan Ottoman sehingga sistem pemerintahan yang semula desentralisasi menjadi sentralisasi. Keputusan Sultan Selim III yang cukup signifikan dalam upaya reformasi tersebut adalah pembukaan hubungan diplomatik dengan Eropa pada tahun 1793. Kebijakan tersebut merupakan sebuah pendekatan ulang hubungan Kekaisaran Ottoman dengan Eropa yang sebelumnya berada dalam persaingan dan permusuhan. Akan tetapi, disebabkan upayanya untuk melakukan reformasi tersebut Sultan Selim III justru harus mengalami kudeta pada tahun 1807 dan wafat karena dibunuh. (Kasaba, 2008)

Reformasi kedua dilakukan oleh Sultan Mahmud II yang memimpin Ottoman dari tahun 1808 sampai 1839. Pada masa kepemimpinannya, tahun 1826 Sultan Mahmud II melakukan pembunuhan massal pada pasukan Jannisari karena dianggap sebagai kelompok yang menghalangi terciptanya pembaharuan di dalam Kekaisaran Ottoman, sehingga ketika pasukan ini tidak ada, maka Sultan Mahmud II dapat melaksanakan program-program pembaruan dengan lebih baik dibandingkan pada masa Sultan Selim III. Sultan Mahmud II kemudian membentuk kelompok pasukan yang baru, memperkuat aktivitas diplomasi dan memperbaiki institusi sipil serta militer. (Kasaba, 2008)

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa pada masa pemerintahan Sultan Selim III dan Sultan Mahmud II dilakukan perbaikan aktivitas diplomasi bahkan dengan Eropa. Hal ini disebabkan kedua pemimpin Ottoman tersebut menyadari bahwa kebutuhan militer kekaisaran tidak bisa

terpenuhi tanpa bantuan dari luar. Kesadaran itulah yang kemudian mendorong Sultan Selim III dan Sultan Mahmud II untuk memberi perhatian lebih pada aktivitas diplomasi. Pada awal abad ke-18 Kekaisaran Ottoman mulai membuka hubungan diplomatik dengan Eropa. Hubungan antara Ottoman dengan Eropa yang terjalin memberikan kesadaran pada pemimpin-pemimpin Ottoman akan keunggulan Bangsa Eropa dalam hal teknologi dan menyebabkan mereka mencari bantuan kemiliteran dari Eropa. Selain itu, perbaikan aktivitas diplomasi juga mengakibatkan terjadinya pergeseran pengaruh dari sultan kepada birokrasi sipil terutama para diplomat. (Toprak, 1999)

Hubungan Kekaisaran Ottoman dengan Eropa tidak hanya dalam masalah kemiliteran, tetapi juga pada masalah ekonomi. Pada tahun 1838, Sultan Mahmud II membentuk *the Ottoman-British Commercial Treaty* yang menandai terjadinya aktivitas perdagangan bebas dan integrasi Ottoman terhadap perekonomian global. Dua reformasi yang dilakukan tersebut membuka peluang terjadinya Tanzimat dalam internal Kekaisaran Ottoman. Tanzimat adalah sebuah gerakan reformasi yang lebih luas, intensif dan signifikan. Periode Tanzimat ini terjadi sejak 1839 hingga 1876. Reformasi ini menghasilkan undang-undang dan program-program baru serta perbaikan pada pemerintah dan institusinya. Pemimpin-pemimpin Ottoman pun berupaya merangkul masyarakat dengan menjamin hak asasi setiap individu dan kelompok. Meskipun demikian, pada periode ini Kekaisaran Ottoman juga mengalami banyak krisis dan pemberontakan di wilayah-wilayah kekuasaannya. (Kasaba, 2008)

Upaya reformasi yang dilakukan oleh Sultan-Sultan Ottoman merupakan reformasi ala barat, dan semakin terlihat pada periode Tanzimat ini. Reformasi-reformasi tersebut mendapatkan banyak perlawanan dari Ulama dan pasukan Jannisari sebelum dilakukan pembunuhan masal oleh Sultan Mahmud II. Ulama dan syariah masih berfungsi karena pembaruan-pembaruan tersebut berada di luar yurisdiksi syariah sehingga terdapat dualisme lembaga termasuk lembaga

hukum dimana kekaisaran tetap memberlakukan hukum syariah namun mulai mengadopsi dan membentuk lembaga hukum barat. Dualisme lembaga ini terjadi hingga munculnya rezim Kemalis. (Ali, 1994)

Reformasi yang dilakukan dengan berbagai cara tersebut ternyata tidak cukup efektif untuk mempertahankan kekaisaran. Adanya reformasi justru menimbulkan konflik diantara pemerintah. Pihak-pihak sekuler sangat mendukung proses modernisasi dan memandang adaptasi teknologi dari Eropa merupakan satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatan Ottoman. Sementara itu, pihak-pihak tradisional menolak reformasi ala barat dan menyerukan untuk kembali pada ajaran agama meskipun pada akhirnya pembaruan ala barat tetap dilakukan. (Harris, 1980)

Dampak yang cukup signifikan dari reformasi tersebut adalah masuknya ide nasionalisme ke dalam masyarakat Ottoman. Seperti yang kita ketahui bahwa Kekaisaran Ottoman memiliki wilayah yang sangat luas dan penduduk yang sangat beragam suku, etnis, budaya, agama dan bahasanya. Banyak pemberontakan dan gerakan separatis begitu masyarakat mengenal ide nasionalisme. Nasionalisme di Turki sendiri tidak terlalu nampak hingga mendekati periode-periode kejatuhan Ottoman. (Harris, 1980)

Kejatuhan Kekaisaran Ottoman diawali dengan peristiwa *Young Turk Revolution*. Revolusi ini terjadi pada Juli 1908 hingga tahun 1918 yang juga dikenal sebagai *the Second Constitutional Period*. Pada revolusi ini, *Young Turk Movement* melakukan upaya untuk memberlakukan kembali Konstitusi Ottoman tahun 1876. Konstitusi tersebut dibuat di bawah kepemimpinan Sultan Abdulhamid II pada tahun 1876 yang dikenal dengan nama *the First Constitutional Era*, sehingga pada masa itu bentuk pemerintahan Kekaisaran Ottoman menjadi monarki konstitusional meskipun hanya bertahan selama dua tahun. (Kasaba, 2008)

Young Turk Revolution bukan merupakan kebangkitan pemuda Ottoman ataupun gerakan liberal seperti yang banyak diketahui. Akan tetapi revolusi ini merupakan sebuah

pemberontakan militer yang direncanakan dengan baik dan dimulai di wilayah Macedonia oleh organisasi *the Ottoman Committee of Union and Progress*. Organisasi ini bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan kekaisaran dan menyelamatkannya dari keruntuhan. Gerakan ini meraih kesuksesan dan berhasil memberlakukan kembali lembaga parlemen serta konstitusi 1876. Bahkan, di bawah slogan “Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan dan Keadilan” gerakan ini berhasil menggulingkan rezim Sultan Abdulhamid II. Pemilihan umum pertama kali juga dilakukan pada periode ini. (Kasaba, 2008)

Setelah revolusi tahun 1908, seorang tokoh *the Committee of Union and Progress*, Ziya Gok Alp menjadi pelopor dan menyerukan pergantian Kekaisaran Ottoman menjadi Negara Turki. Ziya Gok Alp menganjurkan berdirinya negara sekuler di Turki. Prinsip-prinsip yang dibangun oleh Ziya Gok Alp tersebut yang kemudian menjadi inspirasi bagi Mustafa Kemal untuk mendirikan negara nasionalis Turki. (Ali, 1994)

B. Politik Luar Negeri Turki

1. Masa Mustafa Kemal Ataturk

Mustafa Kemal lahir pada tahun 1881 di Thessaloniki, Yunani yang pada waktu itu masih merupakan bagian dari wilayah Kekaisaran Ottoman. Nama aslinya adalah Mustafa saja, dan ia merupakan putra dari Ali Raza dan Zubeyde. Ketika Mustafa bersekolah di sekolah militer, ia kemudian memilih nama Kemal sebagai nama keduanya, sedangkan nama Ataturk atau yang berarti Bapak Bangsa Turki merupakan gelar yang ia peroleh karena ia dianggap berjasa dalam mendirikan Republik Turki. Ayahnya meninggal saat ia berusia 7 tahun sehingga ia dibesarkan hanya oleh ibunya yang merupakan seorang muslim tradisional. Mustafa Kemal sudah memiliki ketertarikan dengan peradaban Eropa sejak ia masih sekolah. Bahkan ia suka membaca informasi mengenai Revolusi Perancis. Mustafa Kemal juga terlibat aktif dalam upaya revolusi yang dilakukan sebelum berdirinya Negara

Turki. Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden pertama Turki yang menjabat sejak 29 Oktober 1923 sampai 10 November 1938. (Kasaba, 2008)

Seperti dipaparkan di atas bahwa pembaruan ala barat di Turki tidak hanya terjadi pada era Mustafa Kemal Atatürk melainkan sudah berlangsung sejak lama bahkan dilakukan oleh para Sultan Ottoman sebelum kejatuhannya. Bahkan pada masa Sultan Selim III, Kekaisaran Ottoman juga telah menjalin hubungan dengan barat. Mustafa Kemal mendirikan Negara Turki berdasarkan prinsip-prinsip Ziya Gok Alp, namun ia menggabungkan prinsip-prinsip tersebut dengan doktrin revolusionernya. Menurut Mustafa Kemal, modernisasi adalah pem-barat-an total. Turki bukan termasuk bangsa timur, akan tetapi merupakan bangsa barat yang terpengaruh oleh budaya timur yang buruk karena interaksi Turki dengan bangsa timur selama ini. Oleh karena itu, Turki harus menjadi bagian dari peradaban barat, sehingga modernisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal lebih radikal daripada periode-periode sebelumnya. (Ali, 1994)

Atatürk melakukan berbagai macam reformasi untuk membaratkan Turki dan masyarakatnya, termasuk kebijakan luar negeri Turki yang disesuaikan dengan standar peradaban barat. Karena ambisinya tersebut, ia merubah kiblat kebijakan luar negeri dari timur ke barat. Menurut Atatürk, terdapat korelasi antara kebijakan luar negeri suatu negara dengan institusi-institusi internal yang ada di negara tersebut, seperti yang ada di dalam pidatonya berikut : (ÇALIŞ, 2003)

“What particularly interests foreign policy and upon which it is founded is the internal organisation of the State. Thus it is necessary that the foreign policy should agreed with the internal organisation. In a state which extends from the East to the West and which [unites] in its embrace contrary elements with opposite characters, goals and culture, it is natural that the internal organisation should be defective and weak in its foundations. In these

circumstances, its foreign policy, having no solid foundation, cannot be strenuously carried on. In the same proportion as the internal organisation such a State suffers specially from the defect of not being national, so also its foreign policy must lack this character. To unite different nations under one common name, to give these different elements equal rights, subject them to the same conditions and thus to found a mighty state is a brilliant and attractive political ideal; but it is a misleading one. It is an unrealisable aim to attempt to unite in one tribe the various races existing on the earth, thereby abolishing all boundaries. Herein lies a truth which the centuries that have gone by and the man who lived during these centuries have clearly shown in dark and sanguinary events.

There is nothing in history to show how the policy of pan-Islamism could have succeeded or how could have found a basis for its realisation on this earth. As regards the results of the ambition to organise a State which should be governed by the idea of world-supremacy and include the whole humanity without distinction of race, history does not afford examples of this. For us, there can be no question of the lust of conquest. On the other hand, the theory which aims at founding a 'humanitarian' State which shall embrace all mankind in perfect equality and brotherhood and at bringing it to the point of forgetting separatist sentiments and inclinations of every kind, is subject to conditions which are peculiar to itself.

The political system which we regard as clear and fully realisable is national policy. In view

of the general conditions obtaining in the world at present and the truths which in the course of centuries have rooted themselves in the minds of and have formed the characters of mankind, no greater mistake could be made than that of being a utopian. This is borne out in history and is the expression of science, reason and common sense. In order that our nation should be able [to] live a happy, strenuous and permanent life, its necessary that the State should pursue an exclusively national policy and that this policy should be in perfect agreement with our internal organisation and be based on it. When I speak of national policy, I meant it in this sense: To work within our national boundaries for the real happiness and the welfare of the nation and the country by, above all, relying on our own strength in order to retain our existence. But not to lead the people to follow fictitious aims, of whatever nature, which could only bring them misfortune, and expect from the civilised world civilised human treatment. Friendship based on mutuality.” (Ghazi, 1929: 377-379; Atatürk, 1989: 584-587).

Visi luar negeri yang diadopsi oleh Mustafa Kemal Atatürk adalah “*Peace at home, Peace in the World*”. Atatürk memandang berbagai isu-isu penting secara rasional serta realis dan hal tersebut sangat tercermin dalam kebijakan luar negeri yang diambilnya. Tujuan utama politik luar negeri Turki pada masa Atatürk adalah mendirikan Negara Turki dengan kekuatan militer dan diplomasi. Prinsip fundamental dari politik luar negeri Turki adalah “*peace*” yang tercermin dengan baik dalam visi politik luar negeri Atatürk di atas. Sampai saat ini prinsip tersebut tetap menjadi pedoman dasar bagi politik luar negeri Turki. Sejalan dengan tujuan politik

luar negeri Turki tersebut, dilakukan pula upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan regional dan internasional yang aman serta stabil untuk memungkinkan Turki menggali berbagai potensi negara yang dimiliki dalam berbagai bidang. (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2011)

Saat itu, Turki didirikan diatas nilai-nilai modern serta sedang berupaya untuk menjadi negara yang sekuler, demokratis dan sosialis yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, Turki berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara lain yang memiliki kesamaan prinsip. Turki juga berupaya memperbaiki hubungan dengan berbagai negara yang dulu sempat terlibat konflik, seperti negara-negara Eropa. Lebih lanjut, penerapan prinsip “damai” dalam politik luar negeri Turki adalah semua persoalan diselesaikan melalui cara diplomasi dan negosiasi yang didasarkan pada kepentingan nasional masing-masing negara, contohnya adalah penyelesaian beberapa sengketa yang melibatkan Turki, seperti sengketa antara Turki dan Yunani yang dilakukan melalui cara diplomasi. (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2011)

Mustafa Kemal Ataturk merupakan seorang pemimpin yang anti imperialis tetapi pro terhadap barat. Sikap anti imperialisnya tersebut ditunjukkan melalui upayanya dalam melawan negara-negara Eropa yang mendukung invasi Yunani dan ingin membagi Turki menjadi wilayah-wilayah jajahan seperti yang tercantum dalam Perjanjian Sevres. Ketika Kekaisaran Ottoman mengalami kekalahan dalam Perang Dunia I, Ataturk menyadari sebuah fakta bahwa negara-negara Eropa ingin menghilangkan eksistensi Bangsa Turki, oleh karena itu ia mempercayai bahwa salah satu cara untuk menjaga keamanan Turki adalah dengan membuat Turki sama seperti Eropa. (ÇALIŞ, 2003)

Kedekatan Ataturk dengan negara-negara barat tampak saat di akhir Perang Kemerdekaan Turki. Bahkan, ketika perang masih berjalan para Kemalis memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Inggris. Pada tahun 1921 Turki juga menandatangani perjanjian persahabatan dengan Prancis.

Ataturk juga sempat memiliki hubungan baik dengan Uni Soviet yang mendukungnya dalam perang kemerdekaan, tetapi hubungan tersebut kemudian merenggang ketika Turki mulai meningkatkan hubungannya dengan barat. Pada tahun 1932, Turki menjadi salah satu negara yang bergabung dengan organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa. (ÇALIŞ, 2003)

Salah satu titik balik dari politik luar negeri Turki di masa Ataturk adalah Perjanjian Lausanne. Perjanjian tersebut memecah Kekaisaran Ottoman menjadi negara-negara yang lebih kecil. Setelah adanya Perjanjian Lausanne, Turki semakin meningkatkan hubungannya dengan barat. Menurut Ataturk, perjanjian tersebut membawa keuntungan bagi Turki, karena dengan begitu Turki dapat diakui oleh dunia internasional. Republik Turki hanya menginginkan kebebasan dan integritas teritorialnya. Selama negara-negara barat dapat menghargai keinginan Turki tersebut, maka Turki dapat berhubungan baik dengan barat. Hal ini menjadi simbiosis mutualisme antara barat dengan Turki, karena kebijakan Turki tersebut sejalan dengan kepentingan barat dan Turki membutuhkan penerimaan dari negara-negara barat untuk kemajuan dari modernisasi yang dilakukan. (ÇALIŞ, 2003)

Ketika Turki mulai berhubungan baik dengan barat, di sisi lain hubungan Turki dengan Timur Tengah dan dunia Islam justru mengalami kemunduran. Ataturk bahkan berpendapat bahwa Turki tidak dapat mengandalkan Pan-Islamisme ataupun Pan-Turkisme untuk dapat bertahan dalam lingkungan yang di dominasi oleh bangsa barat. Untuk negara sekuler seperti Turki, aturan agama bukanlah dasar yang sah untuk melakukan aktivitas hubungan internasional. Pada waktu itu Turki banyak menolak hubungan politik yang didasarkan pada aturan Islam. Berikut ini adalah contoh-contoh ketidaktepatan hubungan Turki dengan dunia Islam :

(ÇALIŞ, 2003)

- Turki menolak untuk bergabung dalam Konferensi Kairo yang diadakan oleh negara-negara serta organisasi Muslim pada tahun 1926. Penolakan tersebut disebabkan karena isu yang akan dibahas pada

Konferensi Kairo adalah mengenai persoalan Khilafah, sehingga dipandang dapat mengganggu sekularisme Turki. Namun, di sisi lain Turki menghadiri Kongress Islam Makkah yang diadakan oleh Raja Ibnu Sa'ud untuk membahas hal-hal terkait Kota Suci dan keamanan ibadah haji. Meskipun demikian, delegasi Turki tetap berupaya menghindari berbagai diskusi mengenai politik.

- Turki bersikap apatis terkait *Third Islamic Congress of Jerusalem* yang diadakan pada Desember 1931. Hal ini disebabkan pemerintah Turki merasa kongress tersebut merupakan kongress keagamaan.
- Pada tahun 1934 sempat terjadi ketegangan antara Turki dengan Mesir disebabkan penolakan pemerintah Turki terhadap duta besar Mesir yang menggunakan kopiah saat acara resepsi diplomatik. Penolakan tersebut menyebabkan kemarahan Raja Fuad, namun ketegangan antar negara dapat diselesaikan dengan damai.
- Ketika Turki memiliki masalah perbatasan dengan Iran pada tahun 1930, Ataturk memerintahkan kepada duta besar Turki untuk Iran agar bersikap keras kepada Iran dan segera kembali ke Ankara apabila pemerintah Iran menolak proposal yang diajukan oleh Turki.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa sejak sebelum Kekaisaran Ottoman runtuh, para sultan sudah memiliki hubungan dengan Eropa dalam upaya modernisasi Ottoman. Kedekatan dengan barat semakin meningkat di masa Mustafa Kemal Ataturk yang berpendapat bahwa untuk maju seperti bangsa barat maka Turki harus bisa serupa dengan barat. Pasca pemerintahan Ataturk, kedekatan Turki dengan barat dimanifestasikan melalui dukungan Turki untuk Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Dukungan tersebut terlihat saat Turki bergabung dalam aliansi NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) yang diinisiasi Amerika Serikat untuk

menghadapi Uni Soviet, bahkan Turki memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan udara Incirlik. Turki juga memiliki hubungan bilateral dengan Israel sejak 1949 dan merupakan negara muslim pertama yang mengakui berdirinya negara Israel.

2. Masa Masa Pemerintahan Partai AKP (*Adelet ve Kalkinma Partisi*)

Adelet ve Kalkinma Partisi atau yang biasa disingkat menjadi AKP merupakan salah satu partai politik yang ada di Turki. Partai ini didirikan pada 14 Agustus 2001 dengan Recep Tayyip Erdogan sebagai pemimpinnya. Tidak lama setelah didirikan, AK Party langsung tersebar di 81 wilayah di Turki. Tidak hanya itu saja, pada pemilu 3 November 2002, AK Party mendapatkan 34% suara dan 363 kursi di parlemen, tentu hal tersebut merupakan pencapaian luar biasa bagi partai politik yang baru berdiri 16 bulan sebelum pemilu dilaksanakan. Pada tanggal 14 Agustus 2001 di Bilkent Hotel, Recep Tayyip Erdogan selaku pemimpin dan pendiri AK Party memberikan sebuah pidato yang berisi : (Publicity and Media Department AK Party, 2015)

“From this moment onwards there is now an ‘Ak Party’ factor in Turkish politics. In Turkish political history this day will be seen as ‘the day when oligarchy collapsed’ when ‘The concept of leadership as a representative of collective wisdom took the place of the concept of monopolistic leadership.’

Today will be seen as the day in Turkish political history when the democratic precedent in internal party structure was not just a wish but was also put in place by a ‘change in mentality’ and through ‘compelling rules and regulations’.

Today will be seen as the day in Turkish political history when a new model of political organization was founded, one that is

transparent in every aspect and completely open to the interrogation and scrutiny of the electorate.”

Kemudahan AK Party dalam mendapatkan kepercayaan dan suara dari masyarakat Turki adalah disebabkan karena pemikirannya yang moderat dan pragmatis. Sebelum AK Party berkuasa, mata uang Turki mengalami devaluasi beberapa kali, sektor perbankan memburuk, maraknya kasus korupsi di kalangan partai-partai sekuler dan perekonomian turun 9,5% di tahun 2001. AK Party mampu mengolah kondisi internal Turki yang saat itu sedang buruk untuk kemudian menarik perhatian publik dan mencitrakan dirinya sebagai “*clean government*”. Sumber utama suara yang diperoleh AK Party berasal dari masyarakat dan imigran kalangan menengah ke bawah yang tinggal di wilayah-wilayah urban. Karena kesuksesannya memimpin pemerintahan dan menstabilkan ekonomi Turki, AK Party mendapatkan suara yang lebih banyak lagi pada pemilu 22 Juli 2007, yaitu sebanyak 46,6%. Bahkan hingga saat ini AK Party masih berkuasa di Turki dan mendominasi parlemen. (Rasaba, 2008)

Pasca kemenangan AK Party dalam pemilu 2001 silam, Erdogan mengatakan bahwa yang menjadi prioritas pemerintahannya adalah perbaikan ekonomi dan menjadi anggota EU (*European Union*). Meskipun AK Party dikenal sebagai partai sayap kanan dan konservatif, tetapi AK Party berpendapat modernitas dan menjadi anggota EU dapat memberi keuntungan untuk Turki. Upaya untuk menjadi salah satu anggota EU tersebut mendapat dukungan dari kelompok-kelompok bisnis yang ada di Turki dan masyarakat secara luas. Selain itu, selama memerintah Turki, AK Party sangat menekankan nilai demokrasi dan hak asasi sehingga pemerintahan Erdogan berupaya menekan pengaruh militer dalam politik seperti yang selama bertahun-tahun terjadi dalam perpolitikan Turki. (Rasaba, 2008)

AK Party sendiri mengklaim konservatif dan demokrat sebagai identitas politiknya. Identitas politik tersebut terbentuk

dari karakter sosial budaya dan dinamika lokal di Turki. Pemahaman konservatif dan demokrat tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Turki dan juga menjadi teladan bagi negara-negara di regional. Konservatisme AK Party menolak segala bentuk otoritarianism, radikalisme dan rekayasa sosial. Menurut AK Party, politik seharusnya didasarkan pada kompromi, toleransi dan menjaga persatuan. (AK PARTi, 2012)

Meskipun berpaham konservatif akan tetapi AK Party tetap menerima prinsip sekuler yang dianut oleh Turki sejak berdiri sebagai negara bangsa. Menurut AK Party, sekularisme harus dipandang sebagai prinsip yang menjaga kenetralan negara terhadap berbagai agama dan kelompok keagamaan, mencegah dominasi suatu kelompok keagamaan terhadap kelompok lainnya dan menjadikan kebebasan beragama sebagai bagian penting dalam demokrasi. AK Party menganggap sekularisme bukan sebagai musuh dari agama, tetapi sekularisme justru menjadi prinsip yang menjaga berjalannya semua agama di negara. Sekularisme akan menjamin hak dari masyarakat yang beragama maupun tidak beragama serta menjalankan keyakinannya dengan bebas dan aman. (AK PARTi, 2012)

Sebagai partai yang mengklaim berpaham demokrat, AK Party berupaya melakukan berbagai macam reformasi yang menjamin keberlangsungan demokrasi di Turki. AK Party menegaskan bahwa partai tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok etnis, agama dan sektarian. Partai berupaya menjaga kebebasan individu, hak-hak fundamental, hak-hak perempuan dan kebebasan berekspresi. Berikut ini adalah sebagian program reformasi yang dilakukan oleh pemerintahan AK Party terkait hukum kebebasan individu di Turki : (Khouli, 2011)

- Mengizinkan etnis non Turki untuk menggunakan bahasa etnisnya dan mengizinkan penggunaan bahasa etnis tersebut dalam siaran televisi etnis Kurdi.

- Hukum anti kekerasan semakin diperkuat dengan cara menambah waktu hukuman penjara bagi pelaku kekerasan.
- Memberdayakan perempuan melalui kebijakan-kebijakan afirmatif
- Melunakkan peraturan mengenai hak organisasi buruh dan hak pemogokan kerja oleh buruh sebagai salah satu aspek dalam hak-hak ekonomi.
- Berupaya untuk menghentikan larangan penggunaan jilbab oleh perempuan di Turki

Kebijakan-kebijakan pemerintahan AK Party yang konservatif dan demokratis tidak hanya menimbulkan dukungan dan simpati dari masyarakat Turki untuk partai akan tetapi juga penolakan dari kelompok sekuler yang berpendapat sepak terjang AK Party berlawanan dengan prinsip-prinsip sekuler Turki. AK Party seringkali dituding memiliki agenda islamisasi Turki yang tersembunyi. Hal tersebut dikarenakan latar belakang kehidupan tokoh-tokoh AK Party yang dekat dengan nilai-nilai Islam. Selain itu AK Party juga berupaya untuk menghentikan larangan penggunaan jilbab dan memberikan perhatian pada perkembangan bisnis syariah di Turki.

Sebagai partai yang sampai saat ini masih menjalankan pemerintahan, selain memiliki agenda-agenda domestik, AK Party juga memiliki kebijakan-kebijakan luar negeri yang dipandang berbeda dari kebijakan luar negeri Turki sebelumnya. Cita-cita AK Party adalah menjadikan Turki sebagai salah satu aktor utama dalam politik global dan regional. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan AK Party Turki menjadi lebih aktif, tegas dan independen dalam politik global. Turki juga lebih menggunakan pendekatan diplomasi daripada *hard power* dan militer dalam hubungan internasionalnya. (Akçakoca, 2009)

Perubahan politik luar negeri Turki tidak hanya sebatas pada sikap Turki yang lebih aktif dan mengutamakan diplomasi, melainkan juga terjadi pergeseran orientasi politik

luar negeri Turki di bawah AK Party. Turki merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, akan tetapi sejak menjadi negara bangsa Turki justru memiliki kedekatan dengan barat dan jauh dari dunia Islam. Namun, di bawah pemerintahan AK Party, Turki tidak hanya meningkatkan hubungan dengan barat tetapi juga fokus memperbaiki hubungannya dengan negara-negara tetangga khususnya Timur Tengah.

Perubahan orientasi politik luar negeri tersebut tidak lepas dari pengaruh kebijakan “*Zero Problem with Neighbors*” dan doktrin *Strategic Depth* yang diusulkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Turki tahun 2009-2014, Ahmed Davutoglu. Pendekatan politik luar negeri yang baru tersebut bertujuan untuk mengakhiri sengketa dan meningkatkan stabilitas di sekitar wilayah Turki, merubah perselisihan menjadi kerjasama, mencari mekanisme yang inovatif untuk menyelesaikan konflik regional serta mendukung perubahan positif di wilayah regional. (Akçakoca, 2009)

Pada tahun 2001 Ahmed Davutoglu menerbitkan bukunya yang berjudul *Strategic Depth*. Buku tersebut berisi penjabaran dari Davutoglu mengenai visi strategisnya untuk Turki. Menurut Davutoglu, Turki memiliki peluang besar untuk menjadi aktor global apabila ditinjau dari sejarahnya, lokasi geografinya dan posisinya sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa Turki adalah negara Timur Tengah, negara Balkan, negara Mediterania, negara Asia Tengah, negara Kaukasus, negara Kaspia, negara teluk juga negara Laut Hitam. Untuk itu, Turki dapat memainkan pengaruhnya di seluruh wilayah regional tersebut. Davutoglu menolak persepsi yang menyatakan bahwa Turki adalah jembatan bagi peradaban timur dan barat, karena hal demikian memberi arti bahwa Turki hanya sebuah alat yang digunakan negara lain untuk mencapai kepentingannya. (Grigoriadis, 2010)

Lebih lanjut, Davutoglu mengatakan Turki harus mengembangkan kebijakan luar negeri yang proaktif dan memperhatikan potensi *soft power* yang dimilikinya. Turki

harus merubah citra negara yang semula dikenal sebagai negara militeristik menjadi negara yang menciptakan resolusi konflik dan memajukan kerjasama ekonomi regional. Berikut ini merupakan pernyataan Ahmed Davutoglu :

“... Turkey enjoys multiple regional identities and thus has the capability as well as the responsibility to follow an integrated and multidimensional foreign policy. The unique combination of our history and geography brings with it a sense of responsibility. To contribute actively towards conflict resolution and international peace and security in all these areas is a call of duty arising from the depths of a multidimensional history for Turkey.”
(Grigoriadis, 2010)

Doktrin *Strategic Depth* merupakan sebuah doktrin geopolitik. Ahmed Davutoglu memberikan landasan ide dan material untuk membentuk Turki menjadi negara kuat yang didasarkan pada sejarah dan geografisnya. Davutoglu menempatkan Turki sebagai sebuah negara kuat di lingkungan internasional yang sedang mengalami perubahan pasca Perang Dingin. Perubahan tersebut menuntut setiap negara termasuk Turki untuk bisa beradaptasi. (Aras, 2010)

Secara ideasional, doktrin Davutoglu tersebut didasarkan pada rasa percaya diri, hubungan baik dengan negara tetangga dan stabilitas domestik. Doktrin ini mengarahkan agar Turki menjadi aktor yang terintegrasi sekaligus inklusif. Maksud terintegrasi sekaligus inklusif adalah Turki tidak bergabung dengan negara-negara yang berkonflik melainkan melakukan kerjasama dengan semua aktor dalam konflik untuk mencari resolusi. Terkait prinsip pelaksanaan doktrin ini, Davutoglu menyadari bahwa doktrin ini harus diseimbangkan dengan memperhatikan aspek keamanan. Untuk itu, prinsip *zero problem with neighbors* mendorong negara untuk melakukan kerjasama, mengambil kebijakan luar negeri yang multidimensi, memaksimalkan

diplomasi, dan memberikan perhatian yang sama terhadap negara tetangga baik negara muslim maupun non-muslim. Prinsip *zero problem with neighbors* kemudian diimplementasikan pemerintah Turki melalui perbaikan hubungannya dengan negara-negara tetangga seperti Syria, Iraq, Iran, Armenia, Yunani, dan Cyprus. (Aras, 2010)

Satu-satunya negara di regional Timur Tengah yang justru mengalami perburukan hubungan bilateral dengan Turki adalah Israel. Kebijakan luar negeri Turki terhadap Palestina di bawah pemerintahan AK Party mendapatkan tanggapan buruk dari Israel terutama ketika Turki dekat dengan pemimpin-pemimpin Hamas. Presiden Erdogan juga sering mengeluarkan pernyataan yang mengkritik Israel, bahkan Turki sempat memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 2010 hingga 2016. Konfrontasi antara Turki dan Israel memang sulit menggambarkan prinsip politik luar negeri Turki *zero problem with neighbors*. Namun kebijakan tersebut sejalan dengan ambisi Turki untuk menjadi aktor utama di perpolitikan regional. Turki dapat berperan sebagai mediator di Timur Tengah tanpa dipengaruhi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa atau Israel. (Grigoriadis, 2010)

Perubahan kebijakan luar negeri tersebut juga berlaku pada hubungan bilateral Turki-Rusia. Hubungan bilateral dua negara ini mengalami perbaikan sejak beberapa tahun yang lalu sebagai akibat dari ketegangan hubungan Turki dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Turki dan Rusia meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, hingga pada tahun 2008 volume perdagangan kedua negara mencapai 26 milyar euro. Turki juga merupakan penyedia gas alam bagi Rusia. Pada kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Turki Bulan Agustus 2009, Presiden Putin menawarkan kerjasama energi yang bernilai 27 milyar euro. (Akçakoca, 2009)

C. Hubungan Bilateral Turki-Iraq

Hubungan bilateral dan kerjasama antara Turki dan Iraq sudah berlangsung sejak era 1990an. Sejak dulu Iraq merupakan partner dagang Turki yang utama. Iraq banyak

mendapatkan berbagai barang yang datang dari Turki, di sisi lain Turki menerima minyak dari wilayah Iraq utara melalui pelabuhannya di Laut Mediterania. Namun, penetapan sanksi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) terhadap Iraq di masa Saddam Hussain berdampak buruk bagi hubungan perdagangan Iraq dan Turki. (Turunc, 2011)

Selama tiga dekade terakhir, kekacauan yang terjadi di Iraq memiliki dampak buruk dan baik bagi Turki. Invasi yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iraq pada tahun 2003 telah menyebabkan ketidakstabilan di wilayah perbatasan Turki-Iraq dan pemerintah Turki mengkhawatirkan pertumbuhan suku Kurdi di Iraq utara, namun di sisi lain setelah berakhirnya Perang Teluk pada tahun 1991 Turki menjadi semakin aktif terlibat dalam berbagai peristiwa di Iraq. Pada tahun 2003, Turki menjadi pendukung invasi Amerika Serikat terhadap Iraq, yang dibuktikan dengan izin penggunaan Pangkalan Udara Incirlik untuk mengoperasikan pesawat-pesawat militer Amerika Serikat dan Inggris dalam upaya kedua negara tersebut melakukan patroli rutin di wilayah Iraq utara. (Barkey, 2005)

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Iraq, Turki sangat berkepentingan terhadap stabilitas Iraq. Turki ingin Iraq tetap menjadi satu negara yang utuh dan tidak terpecah-pecah menjadi banyak negara kecil yang berdasarkan suku dan etnis. Turki juga berharap Iraq memiliki pemerintahan yang kuat untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan politik negara. Untuk itu Turki melakukan berbagai upaya untuk mendukung proses stabilisasi Iraq, diantaranya :

(Turunc, 2011)

- Upaya rekonsiliasi nasional di Iraq yang mempertemukan antara perwakilan-perwakilan partai Arab Sunni dengan Amerika Serikat di Istanbul pada tahun 2005. Pertemuan tersebut merupakan titik balik dari partisipasi Arab Sunni dalam proses politik.
- Pada tahun 2008, Turki kembali berperan penting dalam upaya mediasi antara anggota sunni parlemen

Iraq dengan Amerika Serikat terkait *the Status of Forces Agreement* (SOFA).

- Turki juga menjadi tuan rumah bagi program pelatihan terkait demokratisasi dan *good governance* untuk partai-partai politik Iraq dari berbagai latar belakang etnis dan sekte. Program pelatihan tersebut dihadiri oleh 500 politikus Iraq.
- Pada Juli 2006, Turki bekerjasama dengan *United Nations Assistance Mission in Iraq* untuk mengadakan konferensi di Istanbul terkait konstitusi Iraq yang dihadiri oleh seluruh partai politik Iraq.
- Turki menginisiasi sebuah forum yang dikenal dengan *the Neighbouring Process*. Forum tingkat menteri tersebut mempertemukan Iraq dengan negara-negara tetangga untuk melakukan konsultasi. Saat ini forum tersebut mengalami perkembangan anggota yang terdiri dari negara-negara tetangga Iraq, P-5 (*Permanent Five* atau 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB), negara-negara G-8, OKI, Liga Arab, dan *European Commission*.
- Pada 3 November 2007, Turki dan Iraq mengadakan pertemuan menteri-menteri luar negeri dari negara-negara tetangga Iraq di Istanbul. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 18 negara, baik negara tetangga maupun bukan seperti Kanada, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Inggris, Italia, Jepang, Cina dan Rusia. Beberapa organisasi internasional dan regional juga turut hadir dalam pertemuan tersebut, seperti G-8, PBB, OKI, Liga Arab dan Uni Eropa. (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2007)

Pada tahun 2008, Turki dan Iraq menginisiasi pembentukan HLSC (*High Level Strategy Council*). Pertemuan pertama HLSC dilakukan pada 15 Oktober 2009 di Baghdad dan menghasilkan 48 MoU di berbagai bidang, mulai dari keamanan hingga energi. Pertemuan kedua HLSC dilaksanakan di Ankara pada 25-26 Desember 2014 dan

menghasilkan pernyataan sikap bersama (joint statement) terkait pentingnya kerjasama Turki-Iraq. Selanjutnya, pertemuan ketiga HLSC kembali dilaksanakan di Baghdad pada 7 Januari 2017 selama kunjungan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim di ke Iraq. Pada pertemuan ketiga tersebut, kedua negara menegaskan bahwa keduanya saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama di berbagai bidang termasuk pemberantasan terorisme. (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2017)

Perkembangan dalam hubungan bilateral Turki-Iraq terlihat dalam kunjungan kerja pada Juli 2008 ketika Recep Tayyip Erdogan yang saat itu masih menjabat sebagai perdana menteri Turki ke Iraq. Kunjungan tersebut menghasilkan keputusan untuk mendorong kerjasama ekonomi. Pada Oktober 2010, Nouri al-Maliki yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri Iraq melakukan kunjungan ke Turki untuk mencari bantuan terkait upayanya membentuk pemerintahan setelah pemilu Iraq dilaksanakan. (Turunc, 2011) Selanjutnya, pada 25 Oktober 2017 perdana menteri Iraq, Haidar al-Abadi melakukan kunjungan ke Turki yang menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan segala aspek dalam hubungan bilateral dan meningkatkan kerjasama dalam memerangi organisasi PKK (*Partiya Karkeren Kurdistan*). (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2017)

Kerjasama bilateral Turki-Iraq di bidang energi, ekonomi dan perdagangan telah meningkatkan interdependensi antara keduanya. Turki berharap bahwa upaya stabilisasi Iraq dapat meningkatkan jumlah permintaan barang, jasa dan material yang akan menciptakan kesempatan bisnis bagi perusahaan-perusahaan Turki. Turki merupakan investor perdagangan terbesar di Iraq kecuali dalam sektor perminyakan. Selama ini perusahaan-perusahaan Turki mengeksport berbagai produk industri, mebel, kerajinan tangan, dan barang konsumsi ke Iraq. Pada tahun 2010 menteri perdagangan Turki memperkirakan volume perdagangan

antara Turki dan Iraq mencapai 6 milyar dollar Amerika, jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2003 yang hanya berjumlah 940 juta dollar Amerika. (Turunc, 2011) Pada tahun 2017, volume perdagangan Turki dan Iraq menjadi 7,66 milyar dollar Amerika. Namun ternyata jumlah tersebut mengalami penurunan dari 2014 sampai 2016 karena masalah keamanan di Iraq. Angka volume perdagangan yang cukup tinggi tersebut, menjadikan Iraq sebagai salah satu dari 3 negara partner ekspor terbesar bagi Turki. (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2017)

Sebagai upaya untuk menjaga hubungan ekonomi yang telah berjalan, pada 19 Oktober 2010 pemerintah Iraq membentuk sebuah komite dengan tujuan meningkatkan kerjasama bisnis dan ekonomi dua negara tersebut. Pada 2011 Turki juga sangat mendukung agar Iraq dapat bergabung ke dalam zona perdagangan bebas yang saat itu tengah direncanakan bersama dengan Turki, Syria, Jordan dan Libanon. Iraq adalah salah satu negara yang sangat kaya dengan hidrokarbon. Hal tersebut merupakan peluang bagi Turki untuk menjadi penyalur minyak dan gas Iraq ke pasar internasional, dengan demikian Turki dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Iraq serta menjaga ketersediaan energi di Eropa dan dunia. (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, 2017)

Salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar bagi hubungan ekonomi Turki dan Iraq adalah sektor konstruksi. Sebuah laporan pada tahun 2010 dari Menteri Muda Perdagangan Luar Negeri Republik Turki menyebutkan bahwa sektor konstruksi di Iraq mengalami peningkatan cukup pesat, seperti pembangunan pembangkit listrik; pembangunan rumah, rumah sakit, dan sekolah; pembangunan bandara, rel, pelabuhan dan jembatan; pembangunan instalasi pengolahan air limbah serta proyek pengadaan air bersih. Pada 2007 perusahaan-perusahaan Turki terlibat dalam 39 proyek pembangunan di Iraq yang senilai 545 juta dollar Amerika. Jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2008 yaitu menjadi sebesar 1,43 milyar dollar Amerika. (Turunc, 2011)

Energi juga merupakan sektor utama dalam hubungan bilateral Turki dan Iraq. Pada tahun 2010, perusahaan minyak milik pemerintah Turki menjadi salah satu perusahaan asing yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah Iraq untuk mengembangkan gas alam milik Iraq. Gas alam Iraq memiliki nilai yang penting bagi Turki karena diharapkan dapat memberikan suplai kepada proyek Nabucco, sebuah proyek yang menyalurkan gas dari wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah kepada negara-negara Eropa. Selain itu, Turki juga menerima suplai gas alam dari Iraq untuk kebutuhan dalam negerinya melalui saluran Kirkuk-Ceyhan. Untuk mewadahi kerjasama tersebut, maka pada 7 Agustus 2007 pemerintah Turki dan Iraq menandatangani sebuah MoU yang menyatakan bahwa Iraq akan mensuplai gas alamnya ke Turki dan ke Eropa melalui Turki. (Turunc, 2011)

Apabila Turki memenuhi kebutuhan energi minyak dan gas alamnya dari Iraq, maka Iraq memenuhi kebutuhan listriknya dari Turki. Turki menyediakan listrik sebesar 275 megawatt/jam untuk Iraq dan naik menjadi 1200 megawatt, jumlah tersebut setara dengan seperempat kebutuhan listrik di Iraq. Lebih lanjut, Menteri Ketenagalistrikan Iraq bekerjasama dengan tiga perusahaan Turki untuk instalasi 20 turbin gas di Baghdad, Karbala dan Nineveh. Kerjasama tersebut bernilai 900 juta dollar Amerika dan akan mendorong kapasitas pembangkit listrik Iraq sebesar 2.500 megawatt. Sebagai bagian dalam kerjasama tersebut, sebuah perusahaan Turki bernama Calik Enerji, membangun sebuah pembangkit dan melakukan instalasi 10 turbin di Provinsi Karbala, proyek tersebut bernilai 445,5 juta dollar Amerika. Selain Calik Enerji, perusahaan konstruksi Enka Insaat memenangkan tender proyek sebesar 267,5 juta dollar Amerika untuk membangun pembangkit listrik dan melakukan instalasi 6 turbin di Provinsi Nineveh. Perusahaan Turki yang ketiga yaitu Eastern Lights akan melakukan instalasi 4 turbin di pembangkit listrik yang sudah ada di Baghdad, proyek ini bernilai 204,8 juta dollar Amerika. (Turunc, 2011)

Meskipun Ankara dan Baghdad memiliki kerjasama ekonomi yang cukup baik dan saling menguntungkan, akan tetapi pasca kejatuhan Saddam Hussain, pemerintahan Iraq yang kemudian didominasi oleh Syiah bersikap ambivalen terhadap keterlibatan Turki dalam berbagai isu di Iraq. Hal tersebut disebabkan karena tiga kondisi, yaitu : militer Turki seringkali memasuki wilayah Iraq utara dalam upayanya memerangi kelompok PKK, Turki merupakan negara yang didominasi oleh Muslim Sunni, dan Turki pernah memiliki hubungan perdagangan dengan rezim Saddam Hussain. Namun, di sisi lain pemerintah Iraq menyadari bahwa Turki merupakan negara tetangga Iraq yang paling stabil sehingga diharapkan Turki dapat membantu stabilisasi perekonomian dan infrastruktur Iraq, bahkan Turki dapat menjadi sumber legitimasi internasional bagi pemerintah Iraq. (Turunc, 2011)

Hubungan bilateral suatu negara dengan negara lain terkadang menemui tantangan. Hal tersebut juga terjadi pada hubungan Turki-Irak yang tidak selalu berjalan baik. Misalnya pada Desember 2011 ketika pemerintah Iraq memerintahkan penangkapan kepada mantan presiden Sunni, Tariq al-Hashimi atas kasus terorisme. Namun pemerintah Turki menawarkan suaka kepada Tariq al-Hashimi sehingga menimbulkan ketegangan dengan pemerintah Iraq. Kasus lain misalnya ketika pemerintah Turki mengadakan kerjasama dengan pemerintah KRG tanpa persetujuan dari pemerintah pusat Iraq.

D. Kebijakan Pemerintah Turki Terhadap *Kurdistan Regional Government*

Kurdistan Regional Government (KRG) terbentuk sebagai wilayah bagian Iraq pada tahun 1992 oleh Majelis Nasional Kurdistan, sebuah lembaga parlemen pertama di Kurdistan dan Iraq pasca kebijakan Amerika Serikat menetapkan *no-fly zone* di Iraq utara dengan tujuan melindungi wilayah Kurdistan dari rezim Saddam Hussain. Sebelum penetapan *no-fly zone* oleh Amerika Serikat, masyarakat Kurdistan mengalami diskriminasi dan kekerasan dari pemerintahan Saddam Hussain. Oleh karena itu, pada

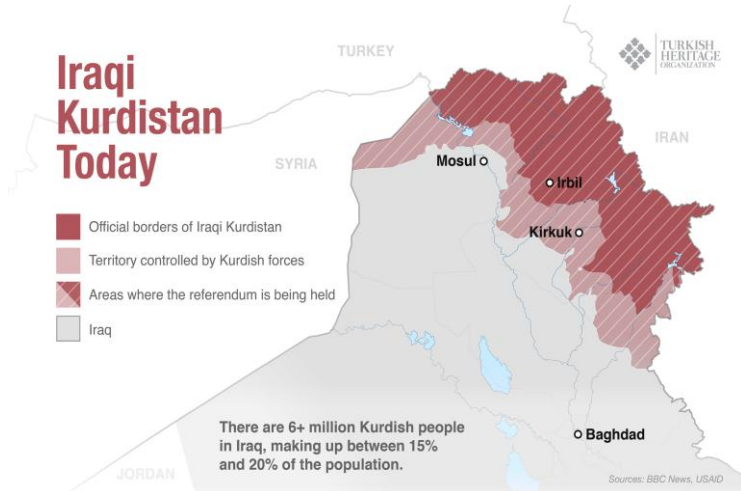
tahun 1991, beberapa hari setelah gencatan senjata perang teluk, masyarakat Kurdistan melakukan perlawanan terhadap Saddam Hussain yang dibalas dengan tindakan represif dari pemerintah. Pasca upaya perlawanan tersebut, Saddam Hussain kemudian memberlakukan blokade terhadap wilayah Kurdistan. (Kurdistan Regional Government, 2018)

Pasca KRG terbentuk, pada tahun 1994 perjanjian pembagian kekuasaan yang telah antara *Kurdistan Democratic Party* (KDP) dan *the Patriotic Union of Kurdistan* (PUK) gagal dilaksanakan, sehingga menyebabkan perang sipil dan pembentukan dua wilayah administrasi yang berbeda, yaitu di Erbil dan Suleimaniah. Tahun 1998, perang sipil tersebut dapat diselesaikan melalui Perjanjian Washington yang ditandatangani oleh KDP dan PUK. Namun pada awal tahun 2006, PUK dan KDP menyetujui penggabungan kembali wilayah administrasi masing-masing dan dibentuklah sebuah kabinet gabungan baru oleh Perdana Menteri Nechirvan Barzani. (Kurdistan Regional Government, 2018)

Setelah rezim Saddam Hussain berakhir tahun 2003, pada tahun 2005 masyarakat Iraq menyetujui pembentukan konstitusi baru. Konstitusi baru tersebut mengakui institusi yang ada di *Kurdistan Region*, yaitu *the Kurdistan Regional Government* dan *the Kurdistan Parliament*. Selain dua institusi tersebut, di *Kurdistan Region* juga terdapat institusi *Kurdistan National Assembly*. Berdasarkan konstitusi Iraq, pemerintahan regional Kurdistan memiliki otonomi khusus dan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif termasuk mengalokasikan anggaran wilayah, mengeluarkan kebijakan terkait keamanan, pendidikan dan kesehatan, mengatur sumber daya alam serta melaksanakan pembangunan infrastruktur. Ibukota *Kurdistan Region* terletak di Kota Erbil dan wilayahnya meliputi tiga provinsi di Iraq utara, yaitu Dohuk, Erbil dan Sulaymaniyah serta beberapa wilayah di Provinsi Nineveh. *Kurdistan Region* juga memiliki pasukan militer sendiri yang dikenal dengan nama Peshmerga. Sejak tahun 2005 sampai 2017 wilayah ini dipimpin oleh Presiden Mahmoud Barzani, namun saat ini belum diadakan

pemilihan untuk memutuskan pengganti Barzani. (UK Border Agency, 2009)

Gambar II.1.Peta Wilayah *Kurdistan Regional Government*



Source : turkheritage.org

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Kurdistan, Turki berupaya menjalin hubungan dengan KRG yang dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu : (Sonmez, 2017)

- Periode pertama yaitu setelah pembentukan *Kurdistan Regional Government* hingga invasi Amerika Serikat ke Iraq (1992-2003). Pada periode ini kebijakan pemerintah Turki ditekankan pada persoalan keamanan. Kebijakan tersebut ditunjukkan melalui upaya Pemerintah Turki menghancurkan perkampungan di Iraq utara yang dihuni oleh kelompok PKK dan upaya pemerintah Turki dalam menjaga integritas teritorial Iraq. Kebijakan pemerintah Turki pada periode ini dapat dikatakan ambivalen karena di satu sisi pemerintah Turki mengizinkan wilayah Turki selatan untuk digunakan

koalisi militer internasional sebagai markas dalam upaya melindungi penduduk Kurdi Iraq dari rezim Saddam Hussain, namun di sisi lain pemerintah Turki mengkhawatirkan perlindungan yang diberikan koalisi internasional terhadap penduduk Kurdi akan membuat Kurdi Iraq semakin kuat. Untuk menanggulangi persoalan tersebut, pemerintah Turki meningkatkan kekuatan politik dan pengaruhnya terhadap Kurdi Iraq sebagai upaya memerangi kelompok PKK yang berada di Iraq utara. Meskipun demikian, pemerintah Turki tetap berupaya menjaga integritas teritorial Iraq dengan menolak berdirinya Negara Kurdistan.

- Periode kedua dimulai sejak tahun 2003 saat Amerika Serikat memutuskan untuk menginvasi Iraq hingga pasca invasi. Pada periode ini kebijakan luar negeri pemerintah Turki terhadap Kurdistan Regional tetap menekankan persoalan keamanan dan upaya memerangi kelompok PKK di wilayah Iraq utara. Selain itu, pemerintah Turki juga berkepentingan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang Turkmen selama dan pasca invasi. Pada periode ini hubungan antara pemerintah Turki dan pemerintahan otonomi *Kurdistan Region* mengalami tantangan disebabkan pemerintah Turki enggan mengakui pemerintahan otonomi tersebut. Sejak awal pembentukan *Kurdistan Regional Government*, pemerintah Turki memang sudah mengkhawatirkan perkembangan kekuatan kelompok Kurdi Iraq. Selain itu, ketegangan antara pemerintah Iraq dan KRG juga disebabkan Turki menolak penguasaan KRG atas wilayah Kirkuk dan menyarankan bahwa masa depan Kirkuk harus didiskusikan dengan komponen masyarakat yang lain seperti orang-orang Arab, Turkmen, dan Asiria yang ada di Kirkuk.
- Periode ketiga dimulai dengan pendekatan ulang hubungan antara Turki dengan KRG. Pasca invasi

Amerika Serikat ke Iraq tahun 2003 silam, Turki berupaya menjalin hubungan dengan KRG meskipun dalam level minimum. Turki memiliki pengaruh yang tidak dapat diremehkan bagi perekonomian Kurdistan Region, karena hubungan wilayah Iraq utara dengan dunia luar dapat dilakukan dengan bantuan Turki. Jika pada periode sebelumnya pemerintah Turki berupaya menolak pemerintahan otonomi KRG, namun pada periode ini pemerintah Turki berpendapat bahwa pemberian otonomi kepada KRG merupakan salah satu cara untuk menjaga integritas teritori Iraq. Kebijakan Amerika Serikat untuk menarik militernya dari Iraq pada tahun 2009 juga mempengaruhi hubungan Turki dengan KRG pada periode ini. Ketiadaan Amerika di Iraq membuat Turki dan KRG dapat menentukan jalannya hubungan bilateral tanpa campur tangan dari Amerika. Alasan lain dari perbaikan hubungan Turki-KRG juga disebabkan karena pengaruh Iran pada pemerintah Iraq pasca Saddam Hussain. Titik balik perubahan hubungan Turki-KRG terjadi pada tahun 2008 ketika Dewan Keamanan Nasional Turki mengeluarkan kebijakan bahwa sesuai dengan kepentingan nasional maka Turki dapat melakukan hubungan dengan berbagai kelompok dan aktor politik di Iraq. Kontak langsung antara pemerintah Turki dan KRG pertama kali dilakukan pada pertemuan yang diadakan antara duta besar Turki untuk Iraq, Murat Ozelik, Ahmed Davutoglu yang saat itu menjadi penasehat Kementerian Luar Negeri Turki, dan Perdana Menteri Kurdistan Region, Nechirvan Barzani. Pertemuan tersebut merupakan awal dari perbaikan hubungan Turki-KRG. Satu tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2009, Presiden Turki, Abdullah Gul melakukan kunjungan ke Baghdad dan bertemu dengan Perdana Menteri KRG Nechirvan Barzani. Pada Bulan Oktober di tahun yang sama, Recep Tayyip Erdogan yang saat

itu merupakan perdana menteri Turki melakukan kunjungan ke Iraq dan membuka tiga perwakilan konsuler Turki di tiga wilayah Iraq, yaitu Erbil, Basra dan Mosul.

Hubungan bilateral Turki-KRG didominasi oleh kerjasama dalam sektor energi, konstruksi dan infrastruktur. Pada tahun 2010 jumlah minyak mentah yang dikirim ke Turki melalui saluran Kirkuk-Yumurtalik adalah 133.000 barel dan mengalami peningkatan mencapai 147.000 barel di tahun 2011. Pada Januari 2015 Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Turki, Taner Yildiz, menyebutkan aliran minyak dari Iraq utara ke Turki telah mencapai 450.000 barel per hari, jumlah ini meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2014. Salah satu perjanjian kerjasama yang sangat penting antara Turki dan KRG adalah pembangunan saluran energi yang akan menggabungkan minyak dan gas alam dari Iraq utara dengan saluran Kirkuk-Yumurtalik. Pembangunan tersebut dilaksanakan setelah negosiasi antara Turki, Amerika Serikat, Iraq dan KRG. (Sonmez, 2017) Perusahaan-perusahaan swasta Turki memiliki investasi yang cukup besar di wilayah KRG dalam sektor minyak seperti di ladang minyak Tak Tak, Khor Mor dan Chemchemical. (Turunc, 2011)

Selain sektor energi, kerjasama perdagangan Turki-KRG juga berjalan dengan baik. Turki mendominasi perekonomian wilayah Kurdistan dengan estimasi 80% barang-barang yang beredar di wilayah tersebut seperti material konstruksi, alat-alat elektronik hingga makanan diimpor dari Turki. Sebanyak 55% perusahaan asing yang terdaftar di wilayah Kurdistan merupakan perusahaan Turki. Pada April 2010, pemerintahan Kurdistan Region menyatakan bahwa Turki dan KRG merencanakan akan membuka jalur pesawat terbang antara Sulaimaniya, Erbil dan Turki untuk mempermudah pergerakan masyarakat umum, perusahaan maupun pebisnis yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan perekonomian. (Turunc, 2011)

Hubungan Turki-KRG tidak hanya terbatas pada persoalan ekonomi dan sumber daya alam saja, tetapi telah berkembang ke persoalan politik dan keamanan. Turki bekerjasama dengan KRG untuk memerangi kelompok PKK di wilayah Iraq utara. KRG telah menutup kamp-kamp PKK yang berada di Iraq utara, bahkan KRG memberikan izin bagi Turki untuk melakukan operasi militer di Iraq utara dalam upayanya memerangi PKK. Pada tahun 2011 dan 2012 Turki melakukan serangan terhadap kamp PKK di Iraq utara, kemudian pada 19 Oktober 2011 militer Turki melakukan pengejaran terhadap anggota-anggota PKK yang melarikan diri setelah melakukan penyerangan di Kota Hakkari, Turki. Pengejaran tersebut hingga masuk ke wilayah Iraq utara. Kemunculan kelompok ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) pada tahun 2014 di Iraq dan Syria juga semakin mendorong kerjasama Turki-KRG dalam sektor keamanan. Kerjasama-kerjasama yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Turki memiliki pengaruh yang cukup kuat di Iraq utara selama hubungannya dengan KRG dalam kondisi baik. (Sonmez, 2017)